

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keanekaragaman pulau di Indonesia menjadikan kaya akan suku, budaya, dan geografi yang berbeda, dengan pemerintah pusat dan daerah yang berbeda. Pemerintah daerah, yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota, mengelola sebagian besar urusan yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat dan pelayanan di tingkat lokal. Daerah otonom memiliki dua ciri utama menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: (1) mereka memiliki kewenangan administratif yang luas untuk mengatur urusan di luar wilayah mereka sendiri; dan (2) mereka memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan, peraturan, dan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan daerah. Mereka dapat mengumpulkan dan memantau pajak serta mengatur anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan lokal.

Pemerintah daerah harus menetapkan anggaran tahunan untuk diterima dan dikeluarkan setiap tahun dalam pelaksanaan otonomi daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah alat keuangan utama untuk manajemen keuangan pemerintahan daerah di Indonesia, dan berfungsi sebagai dasar untuk merencanakan penerimaan dan pengeluaran tersebut. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBD) adalah penjabaran kebijakan pemerintah daerah tentang bagaimana dana dialokasikan dan digunakan untuk berbagai program, proyek, dan kegiatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. APBD disusun dalam beberapa tahap, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Menurut Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dapat diubah jika tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan. Penyesuaian ini diperlukan untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan prioritas daerah. Selain itu, saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Dalam

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Kedua Tahun 2017, Buku II juga mengalami perubahan terkait penganggaran di perangkat daerah.

Stabilitas dan keberlanjutan ekonomi sebuah negara sangat bergantung pada kinerja keuangan pemerintah. Secara umum, kinerja keuangan pemerintah mencakup pendapatan, belanja, dan defisit atau surplus anggaran. Pendapatan pemerintah berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, laba badan usaha milik negara, dan sumbangan dan bantuan asing. Ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, ada defisit anggaran, sementara surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Kebijakan fiskal, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dapat dipengaruhi oleh evaluasi kinerja keuangan pemerintah. Oleh sebab itu, mempunyai pemahaman yang baik tentang keadaan keuangan pemerintah sangat penting ketika membuat rencana untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah didefinisikan sebagai Kemampuan suatu wilayah untuk menggali serta mengelola sumber daya keuangan asli daerah untuk mendukung sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerah disebut kinerja keuangan pemerintah daerah. Wilayah tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat dan dapat memanfaatkan dana untuk kepentingan warganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku (Dali, dkk, 2021: 27).

Pemerintah daerah Kabupaten Bandung memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan. Kinerja pemerintah daerah menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut. Menurut Aurellia (2023,07 Juli) dalam detikJabar “Bupati Dadang mendapat serangan bertubi-tubi. Namun, ia percaya para penegak hukum akan melihat permasalahan yang dilaporkan secara obyektif”.

Terjadi beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Bandung. Hal ini tentu saja mencoreng citra pemerintah dan menimbulkan keraguan public terhadap pengelolaan keuangan daerah dan dikaitkan dengan angka SILPA yang setiap tahun nya masih muncul. maka dengan isu yang terjadi di media masa, membuat peneliti ingin mengetahui 5 tahun kebelakang mengenai kinerja laporan keuangan nya apa kah terdapat indikasi yang menyimpang.Menganalisis rasio keuangan dapat dievaluasi untuk melihat kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah dengan cara berdasarkan informasi laporan keuangan.

Data Realisasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Bandung Tahun 2018-2022 pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1. 1 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bandung

Data Kemandirian Keuangan Kabupaten Bandung			
No	Tahun	Total PAD	Pengeluaran Daerah
1	2018	927.543.321.132,26	84.439.716.870,00
2	2019	1.025.354.252.357,57	20.812.400.000,00
3	2020	1.019.355.741.053,99	8.500.000.000,00
4	2021	1.095.969.843.558,02	16.001.080.000,00
5	2022	1.237.273.508.423,48	113.984.797.625,00

Sumber : PPID Kabupaten Bandung (2014)

Kinerja keuangan sebuah organisasi, seperti pemerintahan, dapat digambarkan sebagai gambar kondisinya. Kinerja keuangan dapat diukur dengan cara tertentu, seperti menghitung pendapatan dan belanja dengan menggunakan metode akrual. Pengukuran ini menghasilkan kesimpulan tentang keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mengelola keuangan. Penelitian ini menggunakan rasio desentralisasi, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja keuangan untuk kepentingan publik.

Dengan demikian penulis, termotivasi untuk mencari tahu kinerja keuangan pemerintah kabupaten Bandung dengan masa periode 5 tahun kebelakang mengenai laporan keuangan dari periode 2018 – 2022 apakah ada yang menyimpang, selain itu Penelitian mengenai kinerja laporan keuangan ini juga dapat membantu menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Perbedaan penelitian ini dengan yang terdahulu yaitu pembaharuan dengan menggunakan 6 variabel rasio dan periode yang lebih lama yaitu 5 tahun dibandingkan dengan yang terdahulu, maka itu peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul “ **Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2022** ”.

1.2 Identifikasi Masalah

Penulis menemukan beberapa masalah yang muncul sebagai berikut :

1. Ketergantungan pemerintah daerah pada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat
2. Kinerja keuangan yang belum efisiensi.
3. Tidak meratanya antara biaya belanja operasional dengan biaya belanja modal.

1.3 Batasan Masalah

Hasil temuan masalah yang diidentifikasi oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung menunjukkan ternyata masih ada beberapa masalah yang belum diselesaikan.. Penulis membatasi masalah menjadi rinci dan mudah dipahami. untuk menghindari penelitian menjadi lebih luas. Tujuannya adalah agar masalahnya dapat diselesaikan dengan lebih baik. karena itu, penelitian ini hanya akan menganalisis rasio-rasio berikut: rasio desentralisasi, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Selain itu, penelitian ini akan menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung dari tahun 2018 hingga 2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung jika dilihat dari Rasio Desentralisasi ?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung jika dilihat dari Rasio Efisiensi ?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung jika dilihat dari Rasio Efektivitas ?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung jika dilihat dari Rasio Keserasian?
6. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Setelah mempertimbangkan rumusan masalah di atas, penulis dapat menyatakan beberapa tujuan penelitian ini, di antaranya:

1. Untuk mengetahui Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung jika dilihat dari Rasio Desentralisasi.
2. Untuk mengetahui Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung jika dilihat dari Rasio Efisiensi.
3. Untuk mengetahui Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung jika dilihat dari Rasio Efektivitas.
4. Untuk mengetahui Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
5. Untuk mengetahui Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung jika dilihat dari Rasio Keserasian.
6. Untuk mengetahui Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan.

1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu penulis dan pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk:

1. Bagi Penulis, dapat memperluas pengetahuan penelitian dalam bidang analisis keuangan, khususnya rasio efisiensi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan.
2. Bagi Pemerintah Daerah, untuk memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah agar mampu mengoptimalkan sumber daya, sebagai bahan perbandingan atas kinerja dari tahun ketahun dan menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah di pemerintahan Kabupaten Bandung.
3. Bagi Peneliti selanjutnya menjadi tolak ukur bagi peneliti selanjutnya sehingga mampu menginspirasi dan motivasi bagi siapapun yang akan meneliti selanjutnya dalam mengkaji lebih lanjut.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang laporan ini, isi laporan skripsi ini dibagi menjadi subbab dengan cara berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulis itu sendiri.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, Teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan Teknik analisis data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan tentang berbagai sumber buku, jurnal dan rujukan yang secara sah dapat digunakan dalam menyusun penelitian ini.